

ABSTRAK

Calvin (01656180089)

AKIBAT HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MILIK DI ATAS HAK PENGELOLAAN YANG DI KUASAI OLEH PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA (STUDI KASUS: TANAH DI KELURAHAN WIJAYA KUSUMA, JAKARTA BARAT).

(xxi + 106 halaman; 1 lampiran)

Permasalahan tanah di Indonesia merupakan permasalahan sering terjadi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap tanah di Indonesia ini. Salah satunya yaitu permasalahan tanah yang terjadi di Jakarta Barat tepatnya di kelurahan Wijaya Kusuma. Berdasarkan peta Hak Pengelolaan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Barat, kelurahan Wijaya Kusuma termasuk dalam tanah Hak Pengelolaan yang dikuasai oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sehingga tanah Hak Pengelolaan tersebut juga dikuasai oleh negara. Irwin Tolib selaku pemegang Hak Milik diatas tanah Hak Pengelolaan tersebut dinyatakan tidak diakui Hak Miliknya tersebut karena terjadi kesalahan penyelenggaraan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Barat. Kesalahan penyelenggaraan yang dimaksud yaitu perubahan hak menjadi hak milik. Memang pada awalnya tanah tersebut berstatus Hak Guna Bangunan diatas Tanah Hak Pengelolaan, tetapi atas kelalaian Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Barat yaitu tanpa memperhatikan peta Hak Pengelolaan, tanah tersebut ditingkatkan menjadi Hak Milik sehingga timbul permasalahan atas tanah tersebut yang mengakibatkan tidak diakui Hak Milik tersebut. Permasalahan yang timbul juga menimbulkan kerugian bagi pihak pemegang Hak Pengelolaan (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta) karena potensi pendapatan uang pemasukan menjadi tidak ada. Penyelesaian terhadap tanah tersebut dilakukan dengan dua cara yaitu pelepasan terhadap tanah tersebut atau melakukan pembatalan hak atas tanah tersebut dengan dasar mengajukan putusan pengadilan pembatalan tanah. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum Normatif dengan menggunakan hasil data wawancara sebagai data sekunder yang kemudian dianalisis.

Referensi: 50 (1982-2016)

Kata Kunci: Hak atas Tanah, Hak Pengelolaan, Hak Milik,

ABSTRACT

Calvin (01656180089)

LEGAL DUE TO LAND OWNERSHIP ABOUT THE LAND MANAGEMENT RIGHTS OWNED BY THE PROVINCIAL GOVERNMENT OF SPECIAL CAPITAL REGION OF JAKARTA (CASE STUDY: LAND IN SUB-DISTRICT WIJAYA KUSUMA, WEST JAKARTA)

(xxi + 106 pages; 1 attachment)

Land problems in Indonesia are a frequent problem. So that it creates legal uncertainty for land in Indonesia. One of them is the land problem that occurred in West Jakarta, to be precise in the Wijaya Kusuma village. Based on the Management Rights map at the West Jakarta Administration City National Land Agency Office, Wijaya Kusuma is included in the Management Rights land controlled by the Special Capitol Region Of Jakarta Provincial Government so that the Management Rights land is also controlled by the state. Irwin Tolib, as the holder of Freehold Rights on the land. The ownership rights were declared not recognized because of a mismanagement by the West Jakarta Administrative City National Land Agency Office. The mismanagement referred to is the change of rights to property rights. Indeed, initially the land had the status of Building Use Rights above Management Rights Land, but due to negligence of the West Jakarta Administration City National Land Agency Office, namely without paying attention to the Management Rights map, the land was upgraded to Ownership Rights so that problems arose over the land which resulted in the non-recognition of ownership rights. The problems that arise also cause losses for the holders of Management Rights (Special Capitol Region Of Jakarta Jakarta Provincial Government) because the potential for income from income is not there. Settlement of the land is carried out in two ways, namely releasing the land or canceling the land rights on the basis of submitting a court decision to cancel the land. The research method used is normative legal research using the results of interview data as secondary data which is then analyzed.

References: 50 (1982-2016)

Keywords: *Land Rights, Land Management Rights, Freehold Land*